Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp
ISSN: 2775-0590 (*online*) ISSN: 2665-3856 (*Print*)
Vol. 8 No. 1 2026
Hal. 35-41

ANALISIS PENGELOLAAN PAD SEKTOR PARIWISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BELANJA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGETAN (2019-2024)

Nadya Ayunda Pramesty[1], Fika Aulia Nidasari[2], Mashur Hasan Bisri[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas PSDKU, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya[123]
Email: 25112064039@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The objective of this study is to examine how the tourism sector manages Local Revenue (PAD) and how this impacts the budget for community economic empowerment in Magetan Regency from 2019 to 2020. The methodology employed is qualitative and utilizes a case study approach. The data used were derived from secondary sources such as the Regional Budget (APBD) reports, publications from the Central Statistics Agency (BPS), and relevant policy documents. Documentary research, indirect observation, and literature review were used to collect data; the data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study indicate that although the COVID-19 pandemic altered the number of tourist visits to Telaga Sarangan, as a flagship destination, there was a significant recovery trend following the pandemic. Although the tourism sector has great potential to increase local revenue (PAD), its management has not been optimal due to deficiencies in management systems, a lack of oversight, and policies that are not integrated across agencies. Furthermore, the increase in local revenue (PAD) from the tourism sector has not yet had a significant impact on expenditures for community economic empowerment. This is evidenced by the fact that spending allocated to the general sector remains dominant compared to empowerment programs that directly target communities around tourist destinations. This study found that improving community welfare through the optimization of the tourism sector does not solely depend on increasing the number of tourists; improved management of local revenue and the integration of more focused local spending policies are necessary. Consequently, policies are needed that can strategically link local revenue sources with spending allocations focused on community economic empowerment.
Keywords: *Local Government Spending, Magetan Regency, Community Empowerment, Local Revenue Management, Tourism*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sektor pariwisata mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagaimana hal ini berdampak pada anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Magetan dari tahun 2019 hingga 2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti laporan APBD, publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan yang relevan. Studi dokumentasi, observasi tidak langsung, dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data; data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 mengubah jumlah kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan, sebagai destinasi unggulan, ada tren pemulihan yang signifikan setelah pandemi. Meskipun sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, pengelolaannya belum optimal karena kekurangan sistem pengelolaan, kurangnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak terintegrasi antar lembaga. Selain itu, peningkatan PAD di sektor pariwisata belum memiliki dampak yang signifikan terhadap

pengeluaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa belanja yang dialokasikan pada sektor umum masih dominan dibandingkan dengan program pemberdayaan yang secara langsung menyasar komunitas di sekitar destinasi wisata. Studi ini menemukan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah wisatawan; peningkatan tata kelola PAD dan integrasi kebijakan belanja daerah yang lebih fokus diperlukan. Akibatnya, diperlukan kebijakan yang dapat menghubungkan secara strategis sumber penerimaan daerah dengan alokasi belanja yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Belanja Daerah, Kabupaten Magetan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan PAD, Pariwisata

PENDAHULUAN

Pariwisata tidak lagi sekadar dipandang sebagai sektor rekreatif, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah di era desentralisasi. Di Indonesia, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin signifikan, terutama bagi daerah yang mengandalkan destinasi unggulan sebagai motor ekonomi lokal. Namun, peningkatan aktivitas pariwisata tidak selalu diikuti oleh optimalisasi pengelolaan PAD dan distribusinya terhadap pembangunan yang inklusif.Optimalisasi pada sektor pariwisata dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Studi Kristiana, Pramono, dan Nathalia (2020) menunjukkan bahwa dua faktor, yaitu jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di daerah yang berfokus pada pariwisata. Ini menunjukkan bahwa pariwisata benar-benar memengaruhi kinerja fiskal daerah. Sektor pariwisata sangat penting bagi Kabupaten Magetan, terutama karena Telaga Sarangan sebagai destinasi utama. Jumlah kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan bervariasi dari tahun 2019 hingga tahun 2020, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1. Data Kunjungan Wisatawan ke Telaga Sarangan

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Pada tahun 2019, jumlah pengunjung tercatat sebesar 917.308 orang, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 629.038 orang dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 547.102 orang. Penurunan ini sejalan dengan dampak pandemi COVID-19 yang secara luas menekan aktivitas pariwisata akibat pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan wisata (Guridno & Guridno, 2020; Cahyadi & Newsome, 2021). Selanjutnya, seiring dengan pemulihan industri pariwisata, jumlah kunjungan mulai meningkat: 920.015 pada tahun 2022, 1.008.155 pada tahun 2023, dan 1.080.666 pada tahun 2024. Tren pemulihan ini ditunjukkan oleh peningkatan kepercayaan wisatawan dan perubahan kebijakan dan manajemen pariwisata pasca pandemi (Wibowo & Hariadi, 2024). Dengan demikian, Telaga Sarangan memiliki potensi yang sangat besar untuk berfungsi sebagai sumber PAD dan penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Magetan.

Namun, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak secara otomatis menunjukkan kualitas manajemen PAD yang optimal. Menurut beberapa penelitian, pengelolaan destinasi yang efektif, kebijakan pemerintah daerah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Mukaffi, Alim, & Tulus, 2022; Dewi & Ma'ruf, 2025). Selain itu, telah ditemukan bahwa pariwisata berbasis masyarakat juga dikenal sebagai pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat, dan hal ini mampu meningkatkan keberlanjutan pariwisata dan memiliki dampak ekonomi yang lebih besar pada masyarakat lokal (Arfa, Hartono, & Widiyanto, 2025).

Dalam penelitian sebelumnya, terapat dua elemen utama telah difokuskan: kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan strategi pengembangan pariwisata pemerintah daerah. Studi oleh Hermin dan Paranoan (2024) dan Ndjurumbaha, Tiwu, dan Ballo (2024) menunjukkan bahwa pariwisata memainkan peran penting dalam meningkatkan PAD, tetapi masih

menghadapi tantangan dalam hal manajemen fasilitas, infrastruktur, dan kualitas layanan. Sementara itu, Bahri, Usman, dan Fatmawati (2024) dan Antarudin, Asmiddin, dan Didi (2025) menemukan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang tidak terintegrasi dapat menghambat penerimaan daerah yang optimal.

Sebaliknya, penelitian tentang dampak PAD terhadap belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih sangat sedikit. Secara konseptual, peningkatan PAD seharusnya meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan yang produktif dan inklusif, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat. PAD harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja publik yang efektif dan tepat sasaran, menurut teori desentralisasi fiskal (Sulaksana, Sudirno, & LM, 2021).

Kajian ini menunjukkan adanya gap penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada hubungan langsung antara sektor pariwisata dan PAD, tanpa mempelajari bagaimana PAD dialokasikan dan dikelola dalam struktur belanja daerah. Kedua, penelitian yang menghubungkan sektor pariwisata dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih menggunakan pendekatan konseptual atau parsial dan belum memasukkan analisis pengelolaan PAD secara menyeluruh. Ketiga, hanya ada sedikit penelitian yang secara khusus mempelajari dampak perubahan tersebut pada pengelolaan PAD dan belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Magetan. Ini terlepas dari fakta bahwa data empiris menunjukkan bahwa kunjungan wisata di Telaga Sarangan meningkat dan meningkat dari tahun 2019 hingga 2024. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu menjembatani hubungan antara pengelolaan PAD sektor pariwisata dan implikasinya terhadap belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih mendalam dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi pengelolaan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Magetan periode 2019–2024, dengan penekanan pada kontribusi destinasi unggulan seperti Telaga Sarangan; (2) mempelajari dampak pengelolaan PAD terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan (3) menemukan variabel yang mempengaruhi efektivitas keterkaitan antara penerimaan PAD sektor pariwisata dan belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian kebijakan publik, khususnya tentang bagaimana sektor pariwisata dapat membantu pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan, dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dan bagaimana hal itu berdampak pada belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konteks kebijakan publik yang rumit dan kontekstual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari makna, prosedur, dan hubungan antar aktor dalam pengelolaan sektor pariwisata daerah (Creswell & Creswell, 2017; Denzin & Lincoln, 2011).

Penelitian ini menggunakan studi kasus dan berfokus pada bagaimana Kabupaten Magetan mengelola pariwisata di destinasi unggulan Telaga Sarangan selama tahun 2019–2024. Pendekatan ini relevan dengan karakteristik penelitian yang menekankan pada analisis kontekstual pasca pandemi COVID-19 dalam industri pariwisata; studi kasus ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena dalam konteks nyata. Khususnya, pendekatan ini relevan karena mampu menganalisis hubungan antara dinamika kunjungan wisata, pengelolaan PAD, dan kebijakan belanja daerah (Yin, 2018).

Data sekunder dari berbagai dokumen resmi dan sumber terpercaya digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Sumber data ini termasuk laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan, data PAD sektor pariwisata, publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kinerja instansi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan pariwisata. Dengan menggunakan data sekunder ini, analisis jangka panjang dapat dilakukan untuk mengamati dinamika sebelum, saat, dan setelah pandemi (Mzobe, 2023).

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1) studi dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, data kunjungan wisata, dan dokumen perencanaan pembangunan; (2) observasi tidak langsung, yang melibatkan melihat kondisi pengelolaan destinasi wisata melalui laporan, data digital, dan sumber visual; dan (3) studi literatur, yang melibatkan mencari referensi ilmiah untuk memperkuat kerangka analisis. Karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti, teknik ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis kebijakan publik dan pariwisata (Creswell & Creswell, 2017).

Model analisis interaktif digunakan untuk melakukan analisis data. Model ini terdiri dari tiga tahap utama: (1) penyederhanaan data, yang menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian; (2) penyajian data (data display), yang diberikan dalam bentuk narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan secara konsisten selama proses penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk menemukan pola hubungan antara PAD sektor pariwisata dan implikasinya terhadap belanja daerah, model ini dievaluasi dengan baik.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yang membandingkan berbagai data dari berbagai dokumen. Selain itu, penelitian ini menerapkan prinsip credibility, dependability, dan confirmability yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Dengan menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang pengelolaan PAD sektor pariwisata serta dampaknya terhadap belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Magetan dalam konteks pasca pandemi dan desentralisasi fiskal dengan menggunakan metodologi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kunjungan Wisata Telaga Sarangan Tahun 2019–2024 dalam Perspektif Teori dan Empiris

Jumlah kunjungan ke Telaga Sarangan mengalami fluktuasi besar dari tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan mencapai 917.308, tetapi turun drastis menjadi 629.038 pada tahun 2020, dan kembali turun menjadi 547.102 pada tahun 2021, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan ini mencerminkan fenomena shock permintaan pariwisata. Sektor ini sangat rentan terhadap krisis luar, seperti pandemi COVID-19, yang membatasi mobilitas dan menekan permintaan wisata.

Jumlah kunjungan meningkat secara signifikan mulai dari 920.015 pada tahun 2022, menjadi 1.008.155 pada tahun 2023, dan terus meningkat hingga 1.080.666 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya *tourism resilience*, yang berarti bahwa pariwisata dapat pulih dari krisis dengan mengubah perilaku pelanggan dan mendapatkan dukungan kebijakan.

Menurut teori *multiplier effect*, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan seharusnya meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan penerimaan daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan belum sepenuhnya dikonversi menjadi optimalisasi PAD, yang menunjukkan bahwa *multiplier effect* sangat bergantung pada kualitas tata kelola fiskal daerah, dan tidak terjadi secara otomatis.

Oleh karena itu, peningkatan kunjungan ke Telaga Sarangan selama pemulihan pasca pandemi menunjukkan potensi ekonomi yang besar. Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan daerah belum secara otomatis mengikuti peningkatan kunjungan, yang berarti evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk pengelolaan PAD sektor pariwisata.

Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata: Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi

Secara struktural, sektor pariwisata memberikan kontribusi PAD melalui retribusi objek wisata, pajak hotel dan restoran, dan aktivitas ekonomi turunan lainnya. Namun, hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan antara kemungkinan dan kenyataan bahwa sektor pariwisata diterima oleh daerah.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan sesuai dengan potensi lokal menurut teori desentralisasi fiskal. Namun, hasil penelitian di Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa otoritas tersebut tidak disertai dengan kapasitas institusional yang cukup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya digitalisasi sistem pemungutan retribusi, kekurangan pengawasan dan kontrol internal, dan kemungkinan kebocoran di seluruh rantai pengelolaan pendapatan dari pemungutan hingga laporan.

Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian institusional, yaitu ketidaksesuaian antara kemampuan daerah untuk menerapkan dan kekuasaan fiskal. Oleh karena itu, masalah utama bukanlah kekurangan potensi sektor pariwisata, tetapi kelemahan tata kelola yang menghalangi daerah untuk memaksimalkan penerimaan.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAD sektor pariwisata Kabupaten Magetan dari tahun 2019 hingga 2024 belum optimal, yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaan. Akibatnya, kelemahan dalam tata kelola dan kapasitas institusional menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan tidak dapat dimaksimalkan sebagai sumber PAD yang efektif.

Implikasi PAD terhadap Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara teoritis, peningkatan PAD seharusnya meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan yang produktif dan inklusif, seperti pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Menurut teori pengeluaran publik, belanja daerah idealnya memiliki fungsi redistributif dan alokatif, yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD di sektor pariwisata belum diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat. Belanja rutin dan pembangunan infrastruktur umum masih menjadi bagian besar struktur APBD, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat biasanya bersifat marginal.

Fenomena ini menunjukkan adanya disconnect fiskal, yang berarti tidak ada hubungan antara sumber penerimaan dan pengeluaran. Akibatnya, masyarakat lokal di sekitar lokasi wisata belum benar-benar merasakan keuntungan finansial yang dihasilkan oleh industri pariwisata.

Akibatnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD di sektor pariwisata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat karena peningkatan PAD belum diikuti oleh alokasi belanja yang secara langsung menyasar masyarakat di sekitar destinasi wisata. Akibatnya, manfaat ekonomi belum terdistribusi secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD hanya akan meningkatkan kapasitas fiskal administratif, bukan kesejahteraan masyarakat, jika tidak ada kebijakan penganggaran yang mendukung pemberdayaan.

Variabel yang Mempengaruhi Keterkaitan PAD dan Belanja Daerah

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah variabel utama yang mempengaruhi efektivitas keterkaitan antara PAD sektor pariwisata dan belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Variabel pertama adalah model penganggaran daerah, yang masih bersifat agregatif dan belum berbasis sektor (*performance-based budgeting*), sehingga tidak terdapat keterkaitan langsung antara sumber penerimaan dan alokasi belanja.

Variabel kedua adalah koordinasi kelembagaan antar OPD, khususnya antara Dinas Pariwisata, Bapenda, dan Bappeda, yang masih lemah sehingga menghambat integrasi kebijakan dan sinergi perencanaan pembangunan.

Variabel ketiga adalah pendekatan pengembangan pariwisata, yang belum sepenuhnya berbasis masyarakat (*community-based tourism*), sehingga partisipasi masyarakat lokal masih terbatas dan manfaat ekonomi belum terdistribusi secara merata.

Variabel keempat adalah kualitas data dan sistem informasi, yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menghambat penerapan *evidence-based policy* dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, keempat variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi efektivitas hubungan antara penerimaan PAD sektor pariwisata dan belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sintesis Pembahasan dan Penegasan Temuan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Telaga Sarangan memiliki potensi yang sangat besar untuk berfungsi sebagai sumber PAD dan katalisator ekonomi wilayah. Karena kelemahan dalam tata kelola fiskal dan integrasi kebijakan, potensi tersebut belum dimaksimalkan.

Dalam hal teori, hasil ini menunjukkan bahwa efek multiplier tidak terjadi secara otomatis; itu sangat bergantung pada seberapa baik tata kelola dan kebijakan fiskal daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal membutuhkan kapasitas institusional yang memadai agar otoritas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa:

1. Pengelolaan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Magetan periode 2019–2024 belum optimal karena adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan.
2. Pengelolaan PAD tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang ditunjukkan oleh belum optimalnya alokasi belanja yang inklusif.
3. Efektivitas keterkaitan antara PAD sektor pariwisata dan belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu model penganggaran, koordinasi kelembagaan, pendekatan pengembangan pariwisata, serta kualitas data dan sistem informasi.

Dengan demikian, keberhasilan sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola fiskal dan integrasi kebijakan daerah. Tanpa reformasi pada aspek tersebut, sektor pariwisata berpotensi hanya menjadi sumber pendapatan daerah tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Magetan, memeriksa bagaimana hal itu berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara penerimaan PAD dan belanja daerah. Berikut adalah beberapa kesimpulan penting yang dibuat berdasarkan penelitian dan diskusi tersebut.

Pertama, meskipun tren kunjungan wisatawan telah meningkat setelah pandemi, pengelolaan PAD sektor pariwisata Kabupaten Magetan periode 2019–2024 belum optimal. Ketidaksesuaian antara potensi dan implementasi PAD menunjukkan kelemahan dalam tata kelola, terutama dalam hal pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan digitalisasi sistem pemungutan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pariwisata belum secara otomatis meningkatkan penerimaan masyarakat di daerah tersebut.

Kedua, peningkatan PAD di sektor pariwisata tidak diikuti oleh peningkatan alokasi belanja daerah untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin dan pembangunan umum, sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata belum terdistribusi secara optimal kepada masyarakat lokal.

Ketiga, empat faktor utama mempengaruhi efektivitas hubungan antara PAD sektor pariwisata dan belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini adalah: (1) model penganggaran daerah yang tidak berbasis kinerja atau sektoral, (2) koordinasi kelembagaan yang buruk antara organisasi perangkat daerah, (3) penerapan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat yang belum optimal, dan (4) kualitas dan integrasi data yang buruk untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan wisatawan atau PAD; itu juga sangat bergantung pada seberapa baik tata kelola fiskal dan integrasi kebijakan daerah. Oleh karena itu, gagasan multiplier effect dalam industri pariwisata tidak stabil dan membutuhkan sistem pengelolaan yang baik.

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan PAD dan belanja daerah harus diubah. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat sistem digitalisasi dan transparansi, menerapkan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Sangat penting untuk melakukan upaya ini karena pariwisata tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Antarudin, H., Asmiddin, A., & Didi, L. (2025). Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 82-88.

Arfa, A. T. F., Hartono, S., & Widiyanto, K. (2025). Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis "Community Based Tourism" Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bontang Kalimantan Timur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *9*(3), 171-180.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. (2020). *Kabupaten Magetan dalam angka 2020*. BPS Kabupaten Magetan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. (2021). *Kabupaten Magetan dalam angka 2021*. BPS Kabupaten Magetan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. (2022). *Kabupaten Magetan dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Magetan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. (2023). *Kabupaten Magetan dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Magetan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. (2024). *Kabupaten Magetan dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Magetan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. (2025). *Kabupaten Magetan dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Magetan.

Bahri, A. I. S., Usman, J., & Fatmawati, F. (2024). Tourism resources development policy in increasing regional original revenue in Bulukumba regency. *Journal La Sociale*, *5*(4), 1082-1090.

Cahyadi, H. S., & Newsome, D. (2021). The post COVID-19 tourism dilemma for geoparks in Indonesia. *International Journal of Geoheritage and Parks*, *9*(2), 199-211.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. sage.

Dewi, T. W. S., & Ma'ruf, M. F. (2025). Pengelolaan Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pengelolaan Wisata Unggulan Kayangan Api Kabupaten Bojonegoro). Media Hukum Indonesia (MHI), 3(3).

Hermin, H., Paranoan, N., & Sabandar, S. Y. (2024). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Mamasa. Jurnal Syntax Admiration, 5(9), 3328-3337.

Huberman, A. M. M. B. (2014). Qualitative data analysis a methods sourcebook.

Kristiana, Y., Pramono, R., Nathalia, T. C., & Goeltom, V. A. H. (2020). Tourism and original local government revenue in Indonesia Tourism Provinces: The Java Island experience. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(9), 745-750.

Lincoln, Y. (1980). Guba. E.(1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage. LincolnNaturalistic Inquiry1985.

Mukaffi, Z., Alim, S., & Tulus, M. (2022). Banyuwangi regional government policy in tourism development and it's contribution to regional original income (PAD). Jurnal Mantik, 6(2), 1829-1835.

Mzobe, S. C. (2023). Religious tourism and COVID-19: Impacts and recovery strategies in South Africa (Doctoral dissertation, University of Johannesburg).

Ndjurumbaha, V. Y., Tiwu, M. I., & Ballo, F. W. (2024). Peran sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Timur. Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif, 2(3), 46-55.

Sulaksana, J., Sudirno, D., & LM, L. S. (2021). Development of agrotourism and its impact on regional tax revenue. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(1), 88-100.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage.